

PENERAPAN PRODUCT LIABILITY TERHADAP PRODUSEN PESAWAT UDARA ATAS KECELAKAAN PENERBANGAN

HASIM PURBA

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Jl. Universitas Nomor 4, Kampus USU Medan.
Email : lklod_sumut@yahoo.com

ABSTRACT

Flight accidents that caused loss of life, injury, permanent disability, in addition to other material and immaterial damages always leave devastating feeling, particularly to the passengers and the relatives of the victims. Flight accidents in fact bring about legal consequences concerning on the party that should be legally liable for the grounds as well as the obligation to pay the financial compensation for the victims or their family. To date, when an accident happened the responsibility is left to the airline company alone, while aircraft building company is not charged with any responsibility due to the absence of clear regulation concerning on such case. This paper aimed to explain how the aircraft building company bore their responsibility or product liability in the case of flight accident and what might become the constraints for the victims in their indictment for financial compensation. This research employed normative and explorative legal study. The result showed that the product liability in Indonesia has not been fulfilled by aircraft Building Company while in other country like the United States; this has been implemented effectively and was even supported by legal adjudication. The constraints faced by victims in their indictment for the damages caused by were due to the absence of explicit regulation or Act that could be used as the basis for the indictment in national Flight Acts.

Keywords: product liability, flight accident, aircraft Building Company

I. PENDAHULUAN

Setiap pengoperasian pesawat udara, baik pesawat udara sipil maupun pesawat udara negara berpotensi untuk menimbulkan resiko apakah bagi pihak operator maupun bagi pihak lain meskipun dewasa ini pesawat udara adalah moda angkutan yang menggunakan teknologi tinggi (Saefullah,2000;1). Sepanjang abad 20 lalu tercatat hampir 11000 kecelakaan pesawat udara, (<http://www.wikipedia.org>)

Berdasarkan data statistik kecelakaan pesawat, menunjukkan bahwa kecelakaan pesawat dapat disebabkan berbagai faktor. Disamping faktor kesalahan manusia (*human error*), juga tidak sedikit disebabkan faktor sistem pesawat yang rusak (Pasaribu,[http://empdinteraktif.com/hg/Jakarta/2003/03/05/brk.20030305-](http://empdinteraktif.com/hg/Jakarta/2003/03/05/brk.20030305-16:id.htm.28k)

16:id.htm.28k) diunduh pada Sabtu, 12 April 2008 Jam 14.05 Wib), yang sering disebut dengan *technical error*. Faktor lain yang juga sering menyebabkan kecelakaan pesawat

adalah kesalahan pengelolaan (*organization error*) yaitu pemeliharaan pesawat yang tidak sepenuhnya mengikuti aturan, guna mengurangi biaya perawatan (*maintenance cost*) yang sewaktu-waktu juga dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan (Pasaribu, <http://empdinteraktif.com/hg/Jakarta/2003/03/05/brk.2003030516:id.htm.28k>,

Oleh karena itu, dalam hal terjadi suatu kecelakaan penerbangan, maka di samping upaya pemberian pertolongan penyelamatan kepada para korban, hal yang tidak kalah pentingnya adalah Pemerintah Indonesia harus meneliti secara benar faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan penerbangan dimaksud. Dalam arti perbuatan sengaja atau kelalaian atau suatu kekeliruan dalam mengambil keputusan pada situasi tertentu (Suherman, 1979; 161).

Mengingat tingginya frekuensi kecelakaan pesawat udara dan jumlah korban jiwa serta kerugian harta benda yang dialami para korban maupun keluarga yang ditinggal korban, maka timbul upaya hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pihak produsen pesawat udara atas kecelakaan pesawat yang diproduksinya terutama tuntutan mengenai ganti rugi atas kerugian yang dialami korban. Menurut Mieke Komar Kantaatmadja, dalam hal kejadian kecelakaan pesawat udara, aspek-aspek hukum udara yang selalu ditonjolkan berkisar pada tanggung jawab operator (perusahaan penerbangan yang bersangkutan) atas kerugian yang diderita oleh para penumpang maupun orang lain yang tidak berstatus penumpang, masalah pembayaran ganti rugi (di Indonesia diberi penamaan “santunan”), masalah asuransi, investigasi kecelakaan pesawat serta pencarian dan bantuan (Kantaatmadja, 1988;29). Lebih jauh Mieke Komar Kantaatmadja juga mengutarakan sejauhmana industri pesawat udara yang memproduksi pesawat, mesin dan komponen pesawat yang naas itu dapat turut diminta pertanggungjawaban atas dasar *product liability* (tanggung jawab atas produk), (Kantaatmadja, 1988: 30).